

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENDUKUNG
KEMANDIRIAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
DI KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lembata)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Oleh:
ASMA ASMIRA
NPM 21801091077**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PRODI ADMINISTRASI NEGARA
MALANG
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis strategi pemberdayaan dan kemandirian Perempuan dan faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berupa kata kata tertulis dan lisan, tidak berkaitan dengan angka angkanya. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsi, menggambarkan dan menguraikan tentang pemberdayaan perempuan melalui kelompok PEKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Berdasarkan hasil penelitian, Strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung kemandirian perempuan dalam keluarga di Kabupaten Lembata antara lain dapat memberikan keterampilan bagikaum perempuan agar kaum perempuan dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki laki, dapat memberikan kesempatan seluas luasnya terhadap kaum perempuan untuk mengakses segala program pembangunan yang ada, menghilangkan mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam Rumah Tangga, melalui edukasi kegiatan masyarakat, Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring masa program pembangunan yang ada ditingkan lingkungannya, bekerjasama dengan lembaga sosial masyarakat seperti Plan Internasional Dan Pemerhati Perempuan lainnya untuk meningkatkan kepedulian perempuan dalam kelompok atau organisasi, serta membentuk KPAPD (Kelompok Perlindungan Anak dan Perempuan Desa) di setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Lembata.

Kemudian untuk faktor mendukung kemandirian perempuan di Kabupaten Lembata dalam pembahasan diatas disimpulkan bahwa, dapat melakukan sosialisasi, adanya perhubungan antara pengaruh utama gender dalam pembangunan di Kabupaten Lembata, serta keputusan Bupati Lembata tentang Pembentukan forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan hak hak Perempuan, sedangkan untuk faktor yang menghambat kemandirian perempuan di Kabupaten Lembata antara lain seperti kurangnya kesadaran perempuan, kurangnya saran dan prasara, beban dan peran ganda, masih belum teratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pemberdayaan, perhatian dan partisipasi dikalangan dunia usaha tentang pemberdayaan perempuan belum optimal, serta budaya patriarki masih langgeng dikalangan masyarakat budaya tersebut telah mempersempit bahkan menutup akses perempuan untuk ikut berpartisipasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemandirian, Perempuan, Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

ABSTRACT

This research aims to know, describe, and analyze the strategies for empowering and promoting the independence of women, as well as the supporting and inhibiting factors of women's empowerment in the Department of Empowerment and Child Protection in Lembata District. The author uses a descriptive qualitative approach in this research because the problem being discussed in this study is in the form of written and spoken words, not related to any assumptions. The researcher intends to describe, illustrate, and elaborate on women's empowerment through the PEKA group (Women Head of Family). bahasa indonesia

Based on the research results, the strategies used by the Department of Women's Empowerment to support women's independence within families in Lembata District include providing skills for women so that they can be productive and not rely on men, providing as many opportunities as possible for women to access all available.

development programs, eliminating the myth of women as mere household complements through community education activities, involving women's groups in the planning, implementation, and monitoring of development programs in their respective environments, collaborating with social institutions such as Plan International and other women's advocates to increase women's awareness within groups or organizations, as well as establishing KPAPD (Village Child and Women Protection Groups) in every village in the Lembata District area.

Then, regarding the factors that support women's independence in Lembata District discussed above, it is concluded that there can be socialization, the existence of a relationship between the main gender influence in development in Lembata District, as well as the decision of the Lembata Regent on the formation of the Communication Forum for Advocates and Struggles for Women's Rights. Meanwhile, the factors that hinder women's independence in Lembata District include the lack of awareness among women, lack of resources, burden and double roles, still uneven understanding and participation of the community, especially women in empowerment, attention and participation among the business world regarding women's empowerment is not optimal, and patriarchal culture still persists among the culture society which has narrowed down or even closed women's access to participate.

Keyword: Empowerment, Independence, Women, Family, Department of Women's Empowerment and Child Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan serta mengontrol kehidupannya sendiri. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) menjadi penting karena perempuan yang menjadi kepala keluarga seringkali menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang lebih berat daripada keluarga yang dipimpin oleh pria. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan kepala keluarga perlu dilakukan agar mereka dapat menjadi mandiri dan memperoleh hak-hak yang sama dengan pria.

Untuk melakukan suatu pemberdayaan maka dibutuhkan adanya pembinaan atau pendampingan masyarakat yang dilakukan terutama bagi pihak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sendiri yang memberdayakan perempuan melalui program-programnya untuk membantu kaum perempuan dalam mengembangkan potensi diri untuk bisa mengubah kondisi hidupnya, agar terciptanya suatu pembangunan bertarap ekonomi, sosial, dan juga budaya.

Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunannya yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan dan

peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Selain pemahaman perempuan tentang peraturan daerah pemahaman perempuan tentang pemberdayaan perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dalam pembangunan.

Melihat kondisi meningkatnya jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan, namun pihak pemerintah belum mengambil tindakan memfokuskan perhatian serta perlindungan terhadap perempuan kepala keluarga, sehingga wanita harus membawa beban, untuk memenuhi tanggung jawab semua kebutuhan hidup anggota keluarganya baik kebutuhan ekonomi dan sosial seluruh keluarga, sementara seorang perempuan mempunyai banyak tanggung jawab didalam sebuah keluarga seperti tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anak dan juga sebagai seorang istri. karena banyaknya masalah sosial yang dihadapi para perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perempuan menjadi pengedar narkoba, maraknya pelecehan seksual dan pekerja seks komersial yang tersebar dikalangan masyarakat.

Perempuan Kepala Keluarga adalah seorang perempuan yang memikul tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, sehingga membutuhkan adanya pemberdayaan masyarakat terkait tingkat kesejahteraan hidup terhadap perempuankepala keluarga, apakah akses kesejahteraan seperti makanan pokok, penghasilan terpenuhi dan kesehatan serta pemberdayaan hukum, pendidikan yang layak untuk anak, harus ditingkatkan melalui peran dari berbagai pihak lembaga organisasi masyarakat serta pemerintah dalam

meringankan beban perempuan kepala keluarga. Kondisi perempuan kepala keluarga rata-rata berasal dari keluarga yang miskin dan berpendidikan rendah dan juga buta huruf, jadi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan yang tidak membutuhkan skill dan juga pengetahuan seperti pekerjaan pembantu rumah tangga, buruh, pedagang, dan pekerjaan yang lain yang mudah dilakukan, ini adalah keadaan realitas bahwa perempuan kepala keluarga menderita menanggung beban berat akibat kemiskinan dan tidak tercapainya kesejahteraan.

Definisi perempuan kepala keluarga menurut Sekretaris Nasional (SEKNAS) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan diri keluarga dan pengambilan keputusan dalam keluarganya. Jumlah perempuan kepala keluarga disebabkan karena beberapa faktor, adapun faktor yang Meningkatkan penyebab perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga yaitu:

1. Perceraian
2. Perempuan yang mempunyai anak akibat pergaulan bebas
3. Karena suami meninggal dunia
4. Karena suami cacat atau sakit parah
5. Karena suami kehilangan pekerjaan
6. Suami pergi tanpa meninggalkan nafkah
7. Perempuan yang belum menikah tetapi punya tanggung jawab.

8. Seorang istri yang dipoligami suaminya.

9. Suami pengangguran

Berdirinya Pemberdayaan Kepala Keluarga (PEKKA) Pada Tahun 2001 memiliki lebih dari 12.000 lebih anggota perempuan kepala keluarga, penyebarannya menggunakan jaringan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang terpencar di 330 Desa di 8 Provinsi di Indonesia termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dan juga meluas ke 19 Provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Perkembangan jaringan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga sampai ke Sumatera Utara sendiri Pada Tahun 2010 tepatnya di Wilayah Asahan, di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sendiri ada sekitar 46 kelompok yang tergabung dalam Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dalam satu kelompok yang terdiri dari 8 desa terdiri dari 11-20 orang perempuan kepala keluarga yang tergabung dalam organisasi kelompok serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.

Dalam pengamatan langsung yang dilakukan penulis ada beberapa hal yang menarik dari Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) ini, terlihat semua anggotanya adalah perempuan dan diketuai oleh seorang perempuan, serta mereka melakukan peran sebagai lembaga pekerja sosial dalam membantu para perempuan untuk bangkit dari keterpurukan, mereka seakan membangkitkan semangat para perempuan kepala keluarga untuk mendapatkan keadilannya walaupun mereka seorang wanita, serta

membantu para perempuan kepala keluarga dalam mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Kabupaten Lembata sendiri memiliki banyak program yang bisa membantu para perempuan untuk menemukan potensi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan adanya peran Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalui program yang dilaksanakan sebagai pekerja sosial yang dapat melayani masyarakat dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan juga politik. Karena selama ini nasib perempuan kepala keluarga sangat di pandang sebelah mata dan juga tidak mendapat keadilan dari pemerintah meski ada beberapa bantuan dana sosial yang diberikan pemerintah tetapi untuk menghadapi masalah lain seperti pengurusan kependudukan sangat sulit diakses seperti pemberian bantuan dan pendampingan masyarakat pada kaum perempuan kepala keluarga. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis terdorong ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur”**.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hardiana (2018) meneliti tentang Strategi Pemberdayaan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang. Hasil Strategi Pemberdayaan perempuan yang dilakukan

dengan cara sosialisasi, memberikan pemahaman dengan cara pembentukan kesadaran secara menyeluruh belum merata dimasyarakat, serta sarana dan prasarana tidak merata dan memadai dan bahkan tidak kena sasaran terhadap kelompok perempuan sehingga menghambat kegiatan yang menunjang keberhasilan perempuan sebagaimana sangat berpengaruh pada keberhasilan kaum perempuan di Kabupaten Enrekang.

Berbeda dengan kajian yang diteliti oleh penulis yaitu Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Kemandirian Perempuan kepala keluarga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur maka penulis mengetahui Strategi Pemberdayaan dan faktor pendukung penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kajian yang sudah diteliti oleh penulis mengenai Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) maka penulis sudah mengetahui sejauh mana strategi dan faktor pendukung penghambat dalam mendukung kemandirian perempuan Kepala Keluarga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan Judul Penelitian yaitu “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur” maka definisi yang perlu dijelaskan adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan

Menurut Djohani (2003) dalam Anwas, (2014:49) “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Dapat diambil Pengertiannya bahwa Pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha yang sistematis dan terencana untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hak di masyarakat bagi perempuan, meningkatkan status, posisi, dan kondisi bagi perempuan agar dapat mencapa kemajuan, meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan dan meningkatkan kualitas kemandirian dalam berorganisasi dan tentunya dapat meningkatkan kemandirian dalam bidang ekonomi untuk mencapai ekonomi yang mandiri dan produktif.

2. Kemandirian

Kemandirian (*self reliance*) adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Individu yang mandiri tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir. (Parker, 2005:226)

Parker (2005:227) juga mengemukakan bahwa kemandirian juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan kemampuan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan dimilikinya tingkat kompetensi fisik

tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi ditengah upaya seseorang mencapai sasaran. Kemandirian berarti tidak adanya keraguan dalam menetapkan tujuan dan tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan.

3. Perempuan Kepala Keluarga

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Dalam Kehidupan sosial politik dan Kemasyarakatan di Indonesia, Kepala Keluarga adalah suami atau laki laki. Dapat diambil definisi dari perempuan kepala keluarga adalah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, mempunyai peran dan melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Mencakup Perempuan yang dicerai/ditinggal hidup, perempuan suaminya meninggal dunia, perempuan bersuami tetapi oleh karena suatu hal suaminya tidak adapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, perempuan yang membujang atau tidak menikah, perempuan bersuami tetapi tidak mendapat nafkah lahir dan batin karena suaminya berpergian lebih dari satu tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dalam Mendukung Kemandirian Perempuan tersebut?
2. Apa saja faktor Pendukung dan penghambat dalam Mendukung Kemandirian perempuan di Kabupaten Lembata tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan dan kemandirian Perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai Pihak terutama bagi akademik agar bisa menambahkan ilmu pengetahuan terutama ilmu mengenai pemberdayaan perempuan dalam mendukung kemandirian perempuan dan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dalam pengembangan ilmu administrasi.

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
 - b) Dijadikan Kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga hasilnya dapat lebih luas dan mendalam.

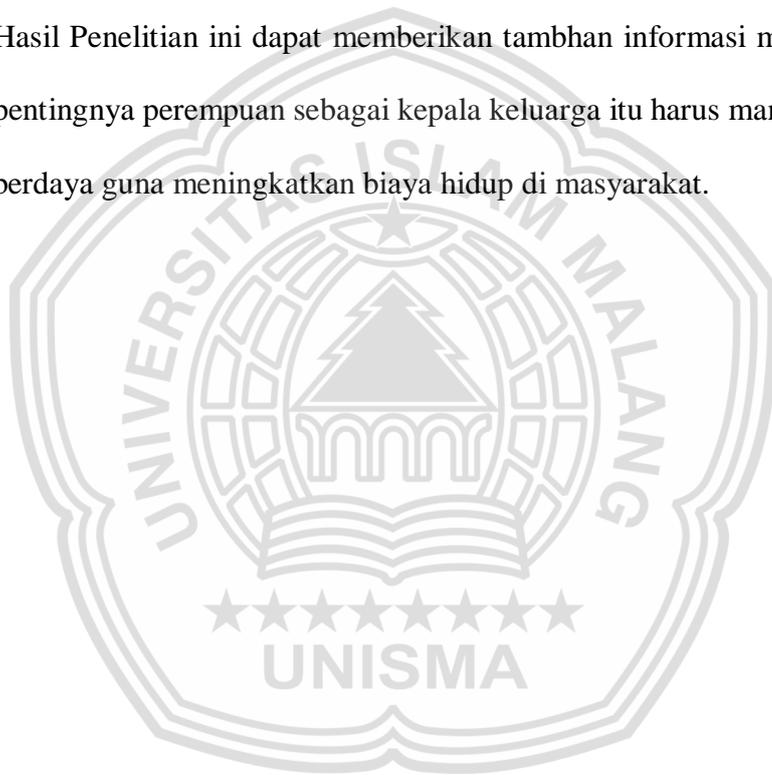
2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontibusinya terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

b) Bagi Perempuan Kepala Keluarga

Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya perempuan sebagai kepala keluarga itu harus mandiri dan berdaya guna meningkatkan biaya hidup di masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberikan dukungan pada perempuan kepala keluarga agar dapat mandiri dalam mengelola kehidupan keluarga mereka. Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memerlukan dukungan dalam hal pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Plan Internasional untuk meningkatkan kemandirian perempuan kepala keluarga di Kabupaten Lembata.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian perempuan kepala keluarga di Kabupaten Lembata, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses terhadap sumber daya dan informasi, serta beban dan peran ganda. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan berbagai strategi dan langkah yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat sendiri.

Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya pemberdayaan dan kemandirian. Oleh karena itu, sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara kontinu dan melibatkan berbagai pihak, seperti komunitas lokal, kelompok perempuan, dan lembaga pemerintah. Selain itu, adanya kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala dalam meningkatkan kemandirian perempuan. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Faktor lain yang menjadi kendala dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lembata adalah beban dan peran ganda perempuan sebagai ibu, istri, dan pekerja. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memperhatikan peran ganda perempuan tersebut. Program pemberdayaan perempuan yang berhasil adalah program yang terintegrasi dengan kebutuhan nyata perempuan, yang memungkinkan mereka untuk memiliki akses yang lebih besar pada sumber daya, serta membantu mereka untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman baru.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk kelompok-kelompok perempuan sebagai wadah untuk mendiskusikan berbagai masalah dan membagikan pengalaman dalam mengatasi masalah sehari-hari. Kelompok-kelompok ini dapat dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta organisasi-organisasi masyarakat setempat,

dengan dukungan dari Plan Internasional. Dalam kelompok-kelompok ini, perempuan kepala keluarga dapat saling memberikan dukungan dan motivasi untuk meningkatkan kemandirian mereka.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Plan Internasional sangat penting. Melalui kerjasama dan kolaborasi yang baik, mereka dapat meningkatkan kualitas program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lembata. Peran perempuan dalam mendukung pemberdayaan juga sangat penting, karena mereka dapat memberikan dukungan moral dan motivasi bagi perempuan kepala keluarga lainnya.

Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perempuan kepala keluarga tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas akses terhadap sumber daya dan informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan, seperti pelatihan keterampilan dan pengelolaan keuangan.

Tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari pemerintah dan berbagai lembaga terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi perempuan kepala keluarga, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk mengurangi beban dan peran ganda yang dirasakan oleh perempuan kepala keluarga, misalnya melalui pembagian peran dalam keluarga dan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, upaya pemberdayaan perempuan dalam mendukung kemandirian perempuan kepala keluarga di Kabupaten Lembata perlu terus ditingkatkan. Peran semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan dan kemandirian perempuan kepala keluarga. Dengan demikian, diharapkan perempuan kepala keluarga di Kabupaten Lembata dapat hidup mandiri dan sejahtera, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

B. Saran

saya dapat memberikan beberapa saran umum yang dapat digunakan sebagai panduan dalam meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan mendukung kemandirian perempuan kepala keluarga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Melakukan pendekatan yang lebih holistik: Selain memberikan pendidikan dan pelatihan, penting untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik dalam memperkuat kemandirian perempuan kepala keluarga. Ini dapat meliputi penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, akses ke sumber daya finansial seperti kredit usaha mikro, serta dukungan dalam mengasuh anak dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Melibatkan komunitas setempat dan memperkuat hubungan antara perempuan kepala keluarga dan masyarakat

dapat membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan adanya keanekaragaman budaya dan nilai-nilai lokal dalam melaksanakan program.

3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga: Penting untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dalam memperkuat kemandiriannya. Ini dapat dilakukan melalui survei dan kajian terhadap kelompok sasaran. Hasil dari survei dan kajian tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan program dan memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
4. Meningkatkan akses ke teknologi dan informasi: Dalam era digital, penting untuk memastikan bahwa perempuan kepala keluarga memiliki akses ke teknologi dan informasi. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses ke internet, pelatihan dalam penggunaan teknologi, dan pengembangan aplikasi yang dapat membantu memperkuat kemandirian perempuan kepala keluarga.
5. Membangun kemitraan yang kuat: Untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan dan mendukung kemandirian perempuan kepala keluarga, penting untuk membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Dalam hal ini, Plan Internasional dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dapat menjalin kemitraan yang kuat untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.

6. Evaluasi dan pemantauan program secara berkala: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi program pemberdayaan perempuan dan mendukung kemandirian perempuan kepala keluarga secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi dan pemantauan program secara berkala juga dapat membantu dalam menyesuaikan program dan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, OOS m, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta.
- Anwas, OOS m, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta.
- Achmad Tantowi Hendra Setiawan. “ *Peren Pemberdayaan Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di PKBM Ngupoyo Ilmu Muncar Kabupaten Banyuwangi.*” Skripsi. 2018
- Buchory, Herry Achmad dan Djaslim Saladin, 2010, *Manajemen Strategi*
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: Deepublish. 2017
- Buangin, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif.* Surabaya: Rajawali Pers.
- Burgin, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Desy Marlina. “ *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus UPPKS “Mekar Sari” di Dusun Wonocatur Banguntapan, Bantul.*” Skripsi. 2017
- Elson, 1991. *Indikator Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan.*
- Erniyati, 2010, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara, Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Erna dede Fujiani, Yus Darusman, Lesi Oktiawanti “ *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Melalui pelatihan Berwirausaha. di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.* “ Jurnal 2019
- Hardiana. “ *Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.*” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Isbandi Adi 2013. *Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Pustaka Belajar
- Lewis Artur, W. 1885. *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta
- Lilis Karwati. “ *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasih Alam Setempat.*” Skripsi. 2017

- Miles Hubberman & Saldana, (2014). Analisis Data. <https://eprints.uny.ac.id>. diakses 22 November 2021
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oliver, Sandra, 2007, *Strategi Public Relations*, Jakarta, Erlangga.
- Parker, D. K. 226-227 (2005). *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Ramadhan Prasetya Wibawa, Liana Vivin Wihartanti. “ *Strategi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.*” Jurnal. Universitas PGRI Madiun, 2019
- Ricardus Wawo. *Mengenal Program Pekka yang Berdayakan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*. Pos-Kupang, 2019
- Sugiyono, (2015). Metodologi Penelitian. <https://eprints.uny.ac.id>, diakses 22 November 2021.
- Suharto Edi, 2000. *Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 230
- Sudarsono, *Pengantar Sosialisasi*, (wikipediaindonesia.melalui<http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> di akses (10/03/207)
- Salusu J, 2006. Manajemen Strategi. Jakarta: Pustaka Pelajar, In Media
- Suyono, 2001. Kualitas Pemberdayaan Perempuan di akses dari Pemberdayaan_Perempun/ pada tanggal 09 Maret 2018.
- Syafika Fakhrun Nisa. “ *Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi pada Pelatihan Batik Shibori di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit. Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Oliver, Thompson 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Esensi Erlangga Group
- Wahib, 2012. *Langkah langkah yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan. langkah-langkah yang dilakukan serta faktor-faktor pendukung dan*

penghambat pemberdayaan perempuan

WIJAYA, Indra Kusuma; MUCHSIN, Slamet; ABIDIN, Agus Zainal. Strategi Pengelolaan Wisata Buper Bedengan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Perum Perhutani Kph Malang Dan Pengelola Wisata (Studi Kasus Wisata Buper Bedengan Desa Solorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 2022, 16.7: 34-41.

Nurwahidah, A. (2021). *Strategi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama "Rumah Pandai" Di Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat)*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020). *Panduan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga*.

